

# EVALUASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

Galena 'Ilma Bahara Liva Persaja

NPP. 29.0941

Asal Pendaftaran Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur  
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: [galenailma07@gmail.com](mailto:galenailma07@gmail.com)

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** *If an area does not have a good enough capacity in dealing with disasters, what happens is that the disaster will have a high threat impact and great vulnerability. Then the higher the impact of threats and the greater the impact of vulnerability, the higher the impact of losses incurred so that the potential for losses in the social, economic, physical, or environmental sectors. Purpose:* *The purpose of this study was to determine and analyze disaster management services at the Regional Disaster Management Agency of Kediri City by conducting an evaluation that was reviewed with 7 dimensions, namely context, input, process, product, outcomes, fulfillment of types, and quality of service needs. Method:* *The technique used in this research is the mixing method (qualitative and quantitative) with a descriptive research approach. In collecting data using several ways, namely interviews, observation, documentation, and questionnaires. Result:* *This analysis results (1) that the performance indicators of the Kediri City Disaster Management Agency for five years can be achieved, (2) the community's assessment product of the Kediri City BPBD service reaches an average of 4.4 or very satisfied (3) service fulfillment disaster management has been realized to the maximum (4) staff shortages and there is a shortage of assets supporting administrative work or services, (5) delivery of disaster-prone information that cannot be carried out optimally through the Destana forum, (6) administrative settlements that are still not optimal, and (7) the recipient of the assistance did not mention the criteria for the recipient and the determination of the target. Conclusion:* *Based on this, it is necessary to submit requests for employees and infrastructure as needed, design a contingency plan, ratify/legalize the 2020-2024 strategic plan that has been made, improve financial management performance, complete data needs with recipient and target data, and make a data recap for needs. disaster prevention and emergency logistics emergency response..*

**Keywords:** *Services, disaster management, Kediri City Regional Disaster Management Agency.*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** *Apabila suatu daerah tidak memiliki kapasitas yang cukup baik dalam mengatasi bencana maka yang terjadi adalah bencana tersebut akan menimbulkan dampak ancaman yang tinggi dan kerentanan yang besar. Maka semakin tinggi dampak ancaman dan semakin besar dampak*

kerentanan membuat semakin tinggi pula dampak kerugian yang ditimbulkan sehingga berpotensi kerugian dalam sektor sosial, ekonomi, fisik, ataupun lingkungan. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pelayanan penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri dengan melakukan evaluasi yang ditinjau dengan 7 dimensi yaitu konteks, input, proses, produk, outcomes, pemenuhan jenis, dan mutu pelayanan kebutuhan. **Metode:** Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik metode mixing/campuran (kualitatif dan kuantitatif) dengan pendekatan penelitian deskriptif. Dalam mengumpulkan data-data menggunakan beberapa cara yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner. **Hasil/Temuan:** Analisis ini menghasilkan (1) bahwa capaian indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri selama lima tahun dapat tercapai, (2) produk penilaian masyarakat terhadap pelayanan BPBD Kota Kediri mencapai angka rata-rata 4,4 atau sangat puas (3) pemenuhan pelayanan penanggulangan bencana telah terealisasi dengan maksimal (4) kekurangan pegawai dan terdapat kekurangan asset penunjang kerja administrasi ataupun pelayanan, (5) penyampaian informasi rawan bencana yang tidak dapat dilakukan secara maksimal melalui forum Destana, (6) penyelesaian administrasi yang masih belum maksimal, dan (7) penerima bantuan tidak menyebutkan kriteria penerima dan ketetapan sasaran. **Kesimpulan:** Berdasarkan hal tersebut diperlukannya mengajukan permintaan pegawai dan sarana prasarana sesuai kebutuhan, merancang Rencana Kontijensi, mengesahkan/melegalkan rancana strategis 2020-2024 yang sudah dibuat, meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, melengkapi data kebutuhan dengan data penerima dan sasaran, dan membuat rekap data untuk keperluan kebutuhan pencegahan bencana dan kedaruratan logistik tanggap darurat.

**Kata kunci:** Pelayanan, penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki kewajiban menerapkan Standar Pelayanan Minimal, salah satunya adalah pemerintah Kota Kediri. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007).<sup>3</sup> Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki fungsi penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah. Pelayanan secara prima yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah salah satunya yaitu penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana (Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008).

Atas dasar hal tersebut, sebagai langkah dalam menurunkan tingkat resiko bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri membuat rencana strategis penanggulangan bencana yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dalam pelaksanaan Dari buku kajian resiko bencana Badan Penanggulangan Daerah Kota Kediri menyebutkan bahwa terjadinya bencana tidak dapat terlepas dari komponen ancaman bencana, kerentanan, dan kapasitas yang dipicu oleh kejadian bencana itu sendiri. Apabila suatu daerah tidak memiliki kapasitas yang cukup baik dalam mengatasi bencana maka yang terjadi adalah bencana tersebut akan menimbulkan dampak ancaman yang tinggi dan kerentanan yang besar. Maka semakin tinggi dampak ancaman dan semakin besar dampak kerentanan membuat semakin tinggi pula dampak kerugian yang ditimbulkan sehingga berpotensi kerugian dalam sektor sosial, ekonomi, fisik, ataupun lingkungan.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal penanggulangan bencana perlu memastikan adanya kesamaan kualitas dan akses terhadap layanan untuk seluruh masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Kota Kediri. Pelayanan penanggulangan bencana harus dirasakan secara merata sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial masyarakat. Pelayanan kepada tingkat penduduk terpapar tinggi tidak bisa disamakan dengan pelayanan kepada tingkat penduduk terpapar sedang atau rendah dan sebaliknya. Terwujudnya hal tersebut maka pemerintah perlu menentukan indikator-indikator yang jelas yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelayanan dengan target pencapaian tertentu sehingga pencapaian akan terukur secara obyektif.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Bencana merupakan kejadian luar biasa yang kerap terjadi di Indonesia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, hilangnya nyawa, harta benda, dan menurunnya angka kesehatan pada skala tertentu (Undang-undang No 24 Tahun 2007). Mengenai dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut seringkali berakibat pada kondisi masyarakat yang tidak stabil sehingga diperlukannya bantuan pemerintah setempat dalam pemulihan kondisi masyarakat ditengah-tengah saat kejadian bencana dan atau setelah kejadian bencana untuk menanggulangi dampak bencana yang lebih besar. Pada tingkat Nasional Kota Kediri menduduki peringkat resiko 287 dan menduduki peringkat 26 se-Jawa Timur. Berdasar kedudukan peringkat resiko tersebut Kota Kediri masuk pada kelas sedang dengan skor indeks 140,80. Dalam menghadapi potensi bencana, pemerintah Kota Kediri perlu membuat upaya penanggulangan bencana yang sistematis dan terukur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Persoalan yang timbul di kalangan masyarakat adalah masyarakat beranggapan bahwa pemerintah daerah belum dapat menangani kasus bencana secara optimal karena sistem pelayanan yang diberikan pemerintah tidak diberikan secara maksimal. Anggapan masyarakat tersebut antara lain adalah keterlambatan bantuan yang diberikan pemerintah, operasional sarana dan prasarana yang tidak sesuai, ataupun tidak tercukupinya pelayanan barang/jasa oleh pemerintah itu sendiri. Kritik yang demikian sering diadukan masyarakat melalui media sosial yang ada, seperti pada akun resmi instagram atau facebook milik dinas/institusi pemerintah, ataupun ditulis langsung di kotak kritik saran dan aduan yang disediakan oleh dinas atau institusi terkait.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini peneliti sebelumnya yang digunakan memiliki topik berkaitan dan relevan dengan topik yang diteliti. Penelitian Muhammad Khozin (2008) diambil dari tesis Program Studi Magister Administrasi Publik yang berjudul “Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan (Study Kasus Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pada Pemerintah Gunungkidul) Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis kualitatif dan kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui capaian dan penerapan standar pelayanan minimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan bidang pelayanan kesehatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pencapaian pelayanan kesehatan pada dasarnya sudah tercapai dengan baik sesuai Standar Pelayanan Minimal. Indikator keberhasilan tersebut dapat dilihat dari kinerja layanan dari tahun ketahun yang sudah tercapai.

Penelitian Rika Seputri (2014) diambil dari thesis Program Studi Magister Manajemen Bencana yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Dalam Pelatihan Penanggulangan Bencana di Kota Padang”. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif yang dilihat dari perolehan data selama penelitian berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan dan menganalisis dampak kebijakan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dilaksanakan kurang efektif dikarenakan adanya pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai dengan tujuan kebijakan salah satunya adalah sedikitnya dana yang dianggarkan untuk kegiatan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Padang. Namun meskipun demikian, masih terdapat keberhasilan dari pihak pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan yaitu terbukti dari terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat dalam kegiatan pelatihan kesiapsiagaan bencana.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terkait dengan standar pelayanan minimal menurut peraturan Menteri dalam negeri no 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Teori yang digunakan menggunakan teori Evaluasi dan Standar Pelayanan Minimal. Teori evaluasi oleh Stufflebeam (1967) dengan mengembangkan dimensi teori evaluasi model CIPP Context evaluation (evaluasi terhadap konsep), Input evaluation (evaluasi terhadap masukan), Process evaluation (evaluasi terhadap proses), Product evaluation (evaluasi terhadap hasil), dan outcomes (evaluasi terhadap hasil). Kemudian teori Standar Pelayanan Minimal oleh Dwiyanto (2013) dengan indikator pemenuhan jenis dan mutu pelayanan kebutuhan.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan Untuk mengetahui dan melakukan evaluasi terhadap standar pelayanan minimal penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri, mengetahui kendala yang muncul di lapangan serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ada.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian metode mixing/campuran (kualitatif dan kuantitatif) dengan pendekatan penelitian deskriptif menurut Julia Brannen (Jurnal Mixing Methods: Qualitative and Quantitative). Metode campuran pada penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan desain penelitian umum, bersifat fleksibel, dan melalui pengembangan data yang muncul pada proses penelitian. Analisis kualitatif pada penelitian ini dilaksanakan secara terus menerus sejak proses penelitian dimulai sampai pada saat akhir penelitian dengan mencari pola melalui “triangulasi” yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan penerapan metode kuantitatif dilakukan dengan spesifik, jelas, dan secara rinci sudah ditentukan oleh peneliti sejak awal. Selanjutnya analisa kuantitatif pada penelitian ini menggunakan hubungan dengan responden yang dibuat dengan jangka waktu penelitian yang sudah ditentukan melalui kuesioner yang sudah

disusun oleh peneliti. Penelitian saat ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan akses data wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk metode kualitatif dan kuesioner atau angket untuk metode kuantitatif.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sub-urusan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana memiliki tolak ukur tersendiri sesuai dengan kemampuan dan kapasitas pemerintah daerah. Dalam penerapannya, Badan Penanggulangan Daerah Kota Kediri memiliki program yang sesuai dengan pelaksanaan penanggulangan bencana yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

Standar Pelayanan Minimal menjadi salah satu prioritas kebijakan nasional yang menjadi tolak ukur yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan sekaligus acuan sebuah penilaian kualitas pelayanan sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Dari pada hal tersebut untuk itu pemerintah daerah diharapkan mampu menyelenggarakan urusan wajib yang telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Standar Pelayanan Minimal masing-masing sesuai petunjuk Lembaga/Kementerian terkait. Penelitian ini secara keseluruhan dievaluasi penulis dengan dimensi yang digunakan peneliti yaitu sebagai berikut:

**Tabel I.**

Dimensi dan Indikator pada Teori Evaluasi oleh Stufflebeam (1967) dan teori Standar Pelayanan Minimal oleh Dwiyanto (2013)

| No | Teori  | Dimensi                  | Indikator  |
|----|--|--------------------------|--|
| 1  | Stufflebeam (1967)                             | Konteks                  | Lingkungan dan kondisi BPBD Kota Kediri                  |
|    |  | Input                    | Standar Operasional Prosedur                             |
|    |  | Proses                   | Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur                 |
|    |  | Produk                   | Penilaian masyarakat terhadap pelayanan BPBD Kota Kediri |
|    |  | outcomes                 | Hasil kuesioner  |
| 2  | Standar Pelayanan Minimal oleh Dwiyanto (2013) | Pemenuhan jenis          | Ketersediaan barang dan jasa                             |
|    |  | Mutu pelayanan kebutuhan | Bobot dan kualitas                                       |

Sumber: teori Stufflebeam dan Dwiyanto diolah oleh penulis 2022

### **3.1 Konteks**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri. Adanya peraturan tersebut sehingga penulis menetapkan indikator evaluasi konteks yaitu ketetapan prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang ditinjau berdasarkan lingkungan kerja seperti visi dan misi, struktur dan kapasitas pegawai, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang ada.

Visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri sudah jelas menjadi gambaran umum dalam tujuannya yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri memiliki peran aktif dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana serta terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat sehingga mewujudkan masyarakat Kota Kediri sadar, siap, dan sigap dalam pengurangan resiko bencana.

Struktur pegawai yang terlihat pada susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri tahun 2022 terbaru memperlihatkan pada bagian pelaksana tertentu tidak ada orangnya atau dapat dikatakan jabatan tersebut kosong. Jabatan fungsional atau pelaksana yang kosong tersebut antara lain yaitu penyusun program anggaran dan pelaporan, penyuluh bencana, analisis bencana, analisis resosialisasi dan rehabilitasi, dan analisis mitigasi bencana.

Selanjutnya ditinjau dari ketersediaan sarana dan prasarana yaitu mencakup seluruh aset tetap yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri memiliki banyak aset sebagai penunjang kerja yang berkaitan dengan kepegawaian ataupun pelayanan penanggulangan bencana untuk masyarakat. Dari data aset tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri Tahun 2018 masih terdapat 72 beberapa aset yang kurang atau tidak terpenuhi. Beberapa yang kurang antara lain yaitu kendaraan dinas, trailer, rak besi logistik, papan nama instansi, AC, AC stand, dispenser, kamera digital, PC, notebook, CPU, printer, dan meja unit non structural.

### **3.2 Input**

Input dalam evaluasi penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri yaitu dimaksudkan untuk fokus terhadap penilaian program yang dilihat dari Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pelayanan dasar informasi rawan bencana, pelayanan kesiapsiagaan bencana, dan pelayanan penyelamatan evakuasi korban bencana..

Standar Operasional Prosedur Pelayanan dasar mengenai informasi bencana dalam tahap pra bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada. Hanya saja yang menjadi kendala yaitu penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai penetapan status bencana yang harusnya dapat disebarluaskan melalui forum Destana (Desa Tangguh Bencana) tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dikarenakan tidak semua Kelurahan di Kota Kediri sudah terbentuk Destana, yaitu hanya 16 dari 46 kelurahan saja yang sudah terbentuk Destana.

Standar operasional prosedur pelayanan kesiapsiagaan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri juga telah memiliki standar operasional prosedur efektif per 2020 dan masih digunakan sampai sekarang. Prosedur tersebut adalah prosedur penyelamatan dan pertolongan

bencana yang telah dipatenkan. Hal-hal lain yang disoroti yaitu mengenai tata cara operasional saat membutuhkan bantuan pihak lain atau dinas lain terkait proses pertolongan dan penyelamatan korban bencana ternyata tidak ada standar operasional secara tertulis atau prosedur yang mengarahkan bagaimana sinergitas antar dinas untuk bekerja sama saat terjadi bencana

Standar operasional prosedur evakuasi pasca bencana yang Berkaitan dengan pertolongan dan penyelamatan di era pandemi saat ini kemudian menciptakan rencana-rencana baru sebagai sarana dan prasarana bagi seluruh masyarakat Kota Kediri. Demi penjagaan protokol kesehatan petugas BPBD ikut andil dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran Covid-19 yaitu diadakannya posko siaga di penyebaran seluruh kelurahan untuk membatasi kegiatan masyarakat terutama saat pelaksanaan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Indonesia) dalam rangka menegakkan kebijakan pemerintah untuk mengurangi angka laju kenaikan covid-19

### **3.3 Proses**

Dalam melaksanakan sebuah evaluasi pada tahap proses ini penulis meninjau kembali rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri dengan mengidentifikasi aspek-aspek penting pelaksanaan prosedur kerja termasuk juga mengetahui faktor pendukung dan penghambat di dalam pelaksanaan program yang telah tertulis dalam rencana strategis (renstra). Sehingga, evaluasi proses ini dapat menjadi sumber informasi yang vital sebagai penafsir hasil-hasil evaluasi selanjutnya..

capaian indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri selama 5 tahun dapat dikatakan berhasil. Target kinerja yang ditetapkan dari tahun ke tahun dapat tercapai, walaupun rasio antara target dan realisasi mengalami penurunan. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri yang tercantum dalam rencana strategis (Renstra) 2020-2024 merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perangkat daerah untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Tingkat penyerapan anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri selama periode 2014 – 2018 terus mengalami peningkatan. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dibuktikan dengan terus meningkatnya realisasi penyerapan anggaran. Komitmen yang tinggi dari pimpinan menjadi salah faktor penentu tingginya penyerapan anggaran di Badan Penanggulangan 85 Bencana Daerah Kota Kediri. Secara berkala pimpinan melakukan evaluasi penyerapan anggaran, serta memberikan motivasi kepada staf untuk mencapai tujuan organisasi.

### **3.4 Produk**

Evaluasi produk ini bertujuan untuk menilai keberhasilan program berdasarkan sasaran program penanggulangan bencana yaitu masyarakat Kota Kediri. Penilaian tentang keberhasilan yang dipilih penulis dalam hal ini yaitu melalui metode kuesioner. Metode kuesioner yang dipilih ditunjukkan kepada seluruh masyarakat Kota Kediri dengan sampel atau responden wilayah kelurahan yang telah membentuk Destana (Desa Tangguh Bencana). Dari keseluruhan 46 kelurahan di Kota Kediri terdapat 16 kelurahan yang telah membentuk Destana. Kemudian diantara 16 kelurahan tersebut penulis memilih secara acak masing-masing 3 kelurahan di setiap kecamatan.

Ke-sembilan kelurahan yang menjadi sampel atau responden penulis mendapatkan jawaban melebihi target yaitu 121 jawaban dari keseluruhan reponden dari Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota, dan Kecamatan Pesantren. Dari ke-tiga kecamatan tersebut masing-masing yaitu memberikan responden sebanyak 34,7% atau 42 responden dari 93 Kecamatan Mojoroto, 28,1% atau 34 responden dari Kecamatan Kota, dan 37,2% atau 45 responden dari Kecamatan Pesantren. Dimana kemudian keseluruhan jawaban diolah oleh penulis dengan metode diagram sebagai berikut:



Sumber: google kuesioner 2022, diolah penulis

Kuesioner pertanyaan pertama yaitu masyarakat dapat mengakses informasi dan edukasi rawan bencana dengan mudah diperoleh nilai 4,49 dengan keterangan sangat puas. Kuesioner pertanyaan kedua yaitu masyarakat dapat melapor kejadian bencana dengan mudah melalui pelayanan adu cepat dan tepat diperoleh nilai 4,44 dengan keterangan sangat puas. Kuesioner pertanyaan ketiga yaitu masyarakat mendapatkan pelayanan sosialisasi secara terpadu dan berkala diperoleh nilai 4,33 dengan keterangan sangat puas. Kuesioner pertanyaan keempat yaitu ketersediaan rambu-rambu evakuasi bencana dan sistem peringatan dini pada titik rawan bencana dinilai sudah tepat diperoleh nilai 4,35 dengan keterangan sangat puas. Kuesioner pertanyaan kelima yaitu saat terjadi bencana petugas penanganan bencana memberikan pelayanan berupa tindakan cepat dan tepat diperoleh nilai 4,49 dengan keterangan sangat puas. Kuesioner pertanyaan kelima yaitu saat terjadi bencana petugas penanganan bencana memberikan pelayanan berupa tindakan cepat dan tepat diperoleh nilai 4,40 dengan keterangan sangat puas.

### 3.5 Outcomes

Evaluasi outcomes yaitu digunakan sebagai pengukuran sejauhmana dampak dari pelaksanaan evaluasi yang telah dilaksanakan. Hal ini berorientasi untuk peningkatan program kerja (improvementoriented evaluation) atau evaluasi untuk pengembangan (evaluation for development), hal ini dikarenakan pada tujuan akhir evaluasi outcomes bukanlah untuk membuktikan (to prove) tetapi untuk meningkatkan (to improve).



Pengukuran mengenai Data-data yang belum terselesaikan atau belum dinyatakan sah/legal antara lain dari indikator kerja penyelesaian dokumen Rencana Kontijensi, presentase jumlah ASN yang ikut pelatihan, presentase warga yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana, presentase warga yang mendapat perlindungan. Sedangkan yang tertulis sah/legal pada capaian kinerja yaitu indikator presentase penyelesaian dokumen Kajian Resiko Bencana dan presentase jumlah penduduk yang memperoleh informasi rawan bencana. Tetapi diantara indikator yang sudah ataupun belum sah/legal juga belum dapat dipastikan kebenarannya dikarenakan pada kenyataannya capaian kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPDP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri tahun 2021 belum selesai.

### **3.6 Pemenuhan Jenis**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang standar pelayanan minimal menetapkan standar pelayanan minimal harus menerapkan prinsip dasar kesesuaian kewenangan, keterjangkauan, kesinambungan, ketersediaan, keterukuran, dan ketetapan sasaran. Dikaitkan dengan peraturan tersebut penulis kemudian memilih indikator pemenuhan jenis untuk mengukur segala aspek yang berhubungan dengan pelayanan penanggulangan bencana.

Pelayanan penanggulangan bencana yang berkaitan dengan pemenuhan jenis tidak hanya mengenai pemenuhan kebutuhan bantuan logistik korban bencana, tetapi pemenuhan jenis yang penulis titik beratkan adalah mengenai pemenuhan program antisipasi dan penanggulangan bencana dengan tujuan meningkatnya efektivitas penanganan bencana untuk terwujudnya kota tangguh bencana.

### **3.7 Mutu Pelayanan Kebutuhan**

Mutu pelayanan kebutuhan sebagai dimensi yang dipilih oleh penulis menitikberatkan pada bobot dan kualitas barang/jasa yang diukur berdasarkan kesesuaian jumlah, kriteria penerima, dan ketetapan sasaran terkait pelayanan penanggulangan bencana untuk seluruh wilayah Kota Kediri. Pelayanan kebutuhan ini tidak hanya saat evakuasi pasca bencana tetapi dapat juga berkaitan saat proses pencegahan pra bencana ataupun kedaruratan/tanggap darurat bencana.

Penulis mengamati untuk data persediaan barang ternyata setiap bulannya terus diperbaharui atau di update tergantung dari perbaharuan mutasi keluar dan masuk. Biasanya update perbaharuan dilakukan setiap per tanggal 31 setiap bulan yang nantinya akan memunculkan data baru. Namun untuk rekap persediaan barang ini yang tersedia hanya pesediaan barang bantuan evakuasi pasca bencana, tidak ada rekap persediaan barang/jasa pelayanan pencegahan pra bencana ataupun saat kedaruratan tanggap darurat bencana

### **3.8 Diskusi Temua Utama Penelitian**

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sub-urusan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana memiliki tolak ukur tersendiri sesuai dengan kemampuan dan kapasitas pemerintah daerah. Dalam penerapannya, Badan Penanggulangan Daerah Kota Kediri memiliki program yang sesuai dengan pelaksanaan penanggulangan bencana yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekontruksi.

Layaknya program evaluasi lainnya identifikasi faktor penghambat atau permasalahan merupakan langkah awal dalam penentuan isu-isu strategis perangkat daerah. Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian penting sebuah organisasi, karena analisis isu-isu strategis menjadi dasar utama penentuan prioritas program yang akan dilaksanakan. Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Harapan pada program evaluasi ini yaitu dapat memberikan dampak positif dari upaya faktor penghambat yaitu pendukung pelayanan penanggulangan bencana didukung dengan adanya eksistensi lembaga BNPB sebagai akses koordinasi, terbentuknya satuan Tim Reaksi Cepat, mekanisme pendanaan yang lebih fleksibel, terbangunnya Pusdalops penanggulangan bencana di pusat dan daerah. Selain itu terdapat beberapa hambatan pelaksanaan pelayanan penanggulangan bencana yaitu keterbatasan kajian resiko bencana yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisis spasial, basis data yang tidak termutakhirkan secara sempurna, tingginya ketergantungan daerah terhadap bantuan pendanaan dari pusat, terbatasnya sumber daya manusia; terbatasnya sarana dan prasarana, dan terbatasnya system informasi dan komunikasi.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penelitian menyimpulkan (1) Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dapat dilihat dari dimensi proses yang menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri selama lima tahun dapat tercapai, dimensi produk penilaian masyarakat terhadap pelayanan BPBD Kota Kediri mencapai angka rata-rata 4,4 atau sangat puas, dan dimensi pemenuhan jenis menunjukkan bahwa pemenuhan pelayanan penanggulangan bencana telah terealisasi dengan maksimal. Namun evaluasi pada beberapa dimensi menunjukkan hasil kurang maksimal yaitu pada dimensi konteks mengevaluasi kekurangan pegawai dan terdapat kekurangan asset penunjang kerja administrasi ataupun pelayanan, dimensi input mengevaluasi penyampaian informasi rawan bencana yang tidak dapat dilakukan secara maksimal melalui forum Destana, dimensi outcomes mengevaluasi mengenai penyelesaian administrasi yang masih belum maksimal, dan dimensi mutu pelayanan kebutuhan mengevaluasi data penerima bantuan tidak menyebutkan kriteria penerima dan ketetapan sasaran. (2) Faktor pendukung pelayanan penanggulangan bencana didukung dengan adanya eksistensi lembaga BNPB sebagai akses koordinasi, terbentuknya satuan Tim Reaksi Cepat, mekanisme pendanaan yang lebih fleksibel, terbangunnya Pusdalops penanggulangan bencana di pusat dan daerah. Selain itu terdapat beberapa hambatan pelaksanaan pelayanan penanggulangan bencana yaitu keterbatasan kajian resiko bencana yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisis spasial, basis data yang tidak termutakhirkan secara sempurna, tingginya ketergantungan daerah terhadap bantuan pendanaan dari pusat, terbatasnya sumber daya manusia; terbatasnya sarana dan prasarana, dan terbatasnya system informasi dan komunikasi. (3) Upaya pemecahan masalah terhadap faktor penghambat pelayanan penanggulangan bencana yaitu mengajukan permintaan pegawai dan sarana prasarana sesuai kebutuhan, merancang Rencana Kontijensi, mengesahkan/melegalkan rancana strategis 2020-2024

yang sudah dibuat, meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, melengkapi data kebutuhan dengan data penerima dan sasaran, dan membuat rekap data untuk keperluan kebutuhan pencegahan bencana dan kedaruratan logistik tanggap darurat.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan terkait dengan waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu OPD yang dijadikan acuan dalam melaksanakan penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti menyadari masih kurangnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana di Kota Kediri Provinsi Jawa Timur untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala dan seluruh pegawai BPBD Kota Kediri, lurah dan masyarakat yang telah berpartisipasi dan memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Creswell, John. W. 2017. *Qualitative Inquiry and Research Design*. Singapore: SAGE Publication
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Setia.
- „Firyal Akbar Dan Widya Kurniati. 2018. Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan Di Indonesia). Gorontalo: Ideas Publishing
- „Haryono, Siswoyo. 2012. Metodologi Penelitian Manajemen. Bekasi: PT. Intermedia Personalia Utama
- Kediri, BPBD Kota, „Dokumen Kajian Resiko Bencana 2020”
- Muhlish, Masnur. 2013. *Bagaimana Menulis Skripsi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sitoyo Dan Sodik Ali, 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing
- Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- „Stufflebeam, D.L. (1971). *Evaluation as Enlightenment for Decision Making*. Columbus, Ohio: Ohio State University..
- „Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- „Brannen, Julia. 2005. *Mixing Methods: The Entry of Qualitative and Quantitative Approaches into the Research Process*. *Jurnal Social Research Methodology*. 8(3): 173-184
- Yusuf, A., Muri. (2014).

*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. PT Fajar Interpratama Mandiri.

Pascasarjana, Program, and Universitas Gadjah Mada, „Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Bidang Kesehatan ( Study Kasus Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) Tesis“, 2008

Pascasarjana, Sekolah, and Universitas Gadjah Mada, „Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Gempabumi Dan Tsunami Dalam Pelatihan Penanggulangan Bencana Di Kota Padang“, 2014

„Mahmudi, Ihwan. 2011. CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan. Jurnal At-Ta“dib. 6(1):112-123“

Raudo, Muhammad Dan Saepudin. 2008. Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Di Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor. Jurnal Riptek. 2(1):1-6“

Supriyatna Dan Maria. 2017. Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna Sistem Informasi DJP Online Pelaporan SPT Pajak. Jurnal Prosiding Snatif. ISBN: 978-602-1180-50-1“

Syafingi, Habib Muchsin, „Konstitusionalitas Standar Pelayanan Minimal“, Jurnal Hukum Novelty, 8.2 (2017),

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kerja Dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat Dan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota